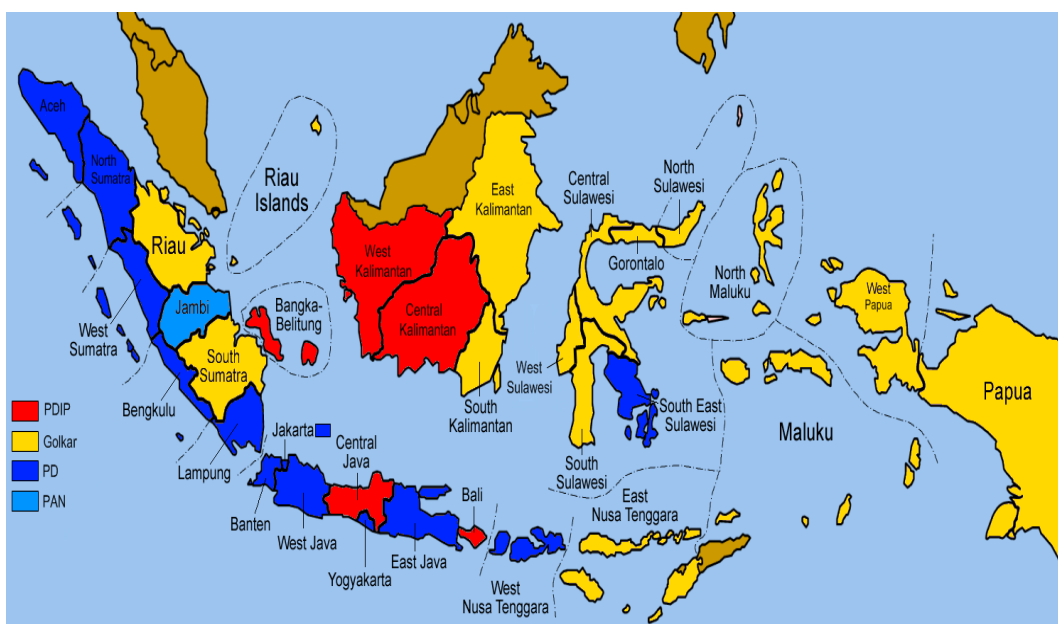


BAB IV

GAMBARAN UMUM

Pada bab IV ini penulis akan menyajikan gambaran umum obyek/subyek yang meliputi kondisi Geografis, kondisi ekonomi, kondisi prasarana infrastruktur seperti jalan, listrik dan air di 33 provinsi di Indonesia.

A. Kondisi Geografis Negara Indonesia



Sumber : www.wikimedia.com

Gambar 4.1
Peta 33 Provinsi di Negara Indonesia

Negara Indonesia terletak pada Letak geografis ditentukan berdasarkan posisi nyata dibanding posisi daerah lain. Indonesia terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta Samudera Hindia dan

Samudera Pasifik. Posisi Indonesia sangat setrategis dan penting dalam kaitannya dengan perekonomian. Indonesia berada persimpangan lalu lintas dunia. Letak geografis merupakan salah satu determinan yang menentukan masa depan dari suatu negara dalam melakukan hubungan internasional.

Negara Indonesia berada di 6^o LU (Lintang Utara) - 11^o LS (Lintang Selatan) dan antara 95^o BT (Bujur Timur) - 141^o BT (Bujur Timur). Jika dilihat dari posisi astronomis Indonesia terletak di kawasan iklim tropis dan berada di belahan timur bumi. Indonesia berada di kawasan tropis, hal ini membuat Indonesia selalu disinari matahari sepanjang tahun. Di Indonesia hanya terjadi dua kali pergantian musim dalam setahun yaitu musim kemarau dan hujan. Negara-negara yang memiliki iklim tropis pada umumnya dilimpahi alam yang luar biasa. Curah hujan tinggi akan membuat tanah menjadi subur. Flora dan fauna juga sangat beraneka ragam. Sedangkan pengaruh dari letak dilihat dari garis bujur, maka Indonesia memiliki perbedaan waktu yang dibagi menjadi tiga daerah waktu yaitu Indonesia bagian timur (WIT), Indonesia bagian tengah (WITA), dan Indonesia bagian barat (WIB). Total luas wilayah Indonesia adalah 7.9 juta km² yang terdiri dari 1.8 juta km² wilayah daratan dan 3.2 juta km² wilayah laut teritorial serta 2.9 juta km² laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Terdiri dari ;

Tabel 4.1*Luas Wilayah 33 Provinsi di Indonesia*

No	Nama Provinsi	Luas Wilayah(km2)
1	Aceh	58.375,63
2	Sumatra Utara	72.981,23
3	Sumatra Barat	42.297,30
4	Riau	87.023,66
5	Kepulauan Riau	253.420
6	Jambi	53.435,92
7	Sumatra Selatan	87.017,41
8	Bangka Belitung	16.493,54
9	Bengkulu	19.788,70
10	Lampung	35.376,50
11	DKI Jakarta	664,01
12	Jawa Barat	35.377,76
13	Banten	9.662,92
14	Jawa Tengah	32.800,69
15	DI Yogyakarta	3.133,15
16	Jawa Timur	47.799,75
17	Bali	5.780,06
18	Nusa Tenggara Barat	18.572,32
19	Nusa Tenggara Timur	48.718,10
20	Kalimantan Barat	147.307,00
21	Kalimantan Tengah	153.564,50
22	Kalimantan Selatan	38.744,23
23	Kalimantan Timur	129.066,64
24	Sulawesi Utara	13.851,64
25	Sulawesi Barat	16.787,18
26	Sulawesi Tengah	61.841,29
27	Sulawesi Tenggara	38.067,70
28	Sulawesi Selatan	46.717,48
29	Gorontalo	11.257,07
30	Maluku	46.914,03
31	Maluku Utara	31.982,50
32	Papua	319.036,05
32	Papua Barat	99.671,63
Luas Indonesia		2.011.519,35

Sumber: *www.indonesiadata.com*

Kondisi Infrastruktur Indonesia Berdasarkan *The Global Competitiveness Report* (2013/2014) yang dibuat oleh *World Economic Forum* (WEF), daya saing Indonesia (*Global Competitiveness Index-GCI*) berada pada peringkat ke-38 dunia. Sementara itu kualitas infrastruktur Indonesia menempati peringkat ke-61 dari 148 negara dunia yang disurvei atau berada pada peringkat ke-5 diantara negara-negara inti ASEAN. Daya saing global Indonesia periode 2014-2015 meningkat empat peringkat dari sebelumnya 38 menjadi 34. Sedangkan dari segi infrastruktur dan konektivitas, ranking Indonesia meningkat dari ranking ke-61 menjadi ranking ke-56. Hal ini berarti menunjukkan peningkatan lima angka dari tahun kemarin atau dua puluh angka sejak 2011 (Bank Indonesia.2015)

Salah satu ketersediaan infrastruktur yang dianggap masih kurang seperti pelabuhan mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang luas. Masih kurangnya infrastruktur pada pelabuhan ini membuat biaya logistik di Indonesia lebih tinggi dibanding negara lain. Proses arus barang yang masuk dan keluar dari dalam negeri ke luar negeri, ataupun antar pulau menjadi terhambat dan biaya logistik semakin membengkak. Jika hal semacam ini tidak segera diatasi, maka investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia akan memilih untuk negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunei Darussalam dengan fasilitas infrastruktur dan kawasan industri yang lebih memadai.

Bagaimana dengan infrastruktur jalan? Saat ini di Indonesia problematika kemacetan sudah biasa dan menjadi makanan sehari-hari di kota-kota besar. Hal ini mengakibatkan ketidakefisienan yang sangat besar karena banyak waktu terbuang di jalan, begitu pula BBM. Begitu pula dengan problematika banjir. Hampir setiap musim hujan, kota-kota besar di Indonesia langganan banjir. Demikian pula dengan kota-kota di dataran rendah atau di daerah aliran sungai besar seperti di pinggir Bengawan Solo.

B. Kondisi Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen pada tahun 2014 tersebut lebih rendah dari asumsi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam APBNP Tahun 2014 sebesar 5,5 persen. Hal tersebut terutama disebabkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada November 2014 beserta dampak ikutannya terhadap harga komoditas di dalam negeri dan peningkatan harga barang impor akibat pelemahan nilai tukar Rupiah menyebabkan tingkat inflasi sepanjang tahun 2014 mencapai sebesar 8,36 persen, atau lebih tinggi dari target inflasi dalam APBNP Tahun 2014 sebesar 5,3 persen. Berdasarkan perkembangan indikator ekonomi makro tahun 2014 tersebut di atas, serta langkah-langkah kebijakan fiskal yang ditempuh selama tahun 2014, kinerja realisasi APBNP Tahun 2014 dapat tetap dijaga pada tingkat yang aman(Kemenkeu,2014)

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.537,2 Triliun, atau mencapai 94,0 persen dari rencana dalam APBNP Tahun 2014 sebesar Rp1.635,4 Triliun. Dari jumlah realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.143,3 Triliun, atau 91,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.246,1 Triliun. Pencapaian penerimaan perpajakan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan, pelemahan impor, dan penurunan harga CPO di pasar internasional. Di sisi lain, kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan capaian yang baik dengan realisasi Rp390,7 Triliun, atau 101,0 persen dari target dalam APBNP Tahun 2014 sebesar Rp386,9 Triliun. Lebih tingginya realisasi tersebut terutama bersumber dari penerimaan PNBP sumberdaya alam (SDA) minyak dan gas. Seluruh target PNBP dalam APBNP Tahun 2014 terlampaui kecuali penerimaan SDA non migas yang berasal dari mineral dan batubara (minerba) serta kehutanan(BPPK.Kemenkeu,2014)

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro, biasanya dilihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Bruto (PDRB), baik atas harga berlaku maupun berdasarkan atas harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Adapun kegunaan dari PDRB harga konstan (riil) adalah untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 disebabkan karena perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil, tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 dan Indeks harga produsen, kemudian juga adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan (BPS, 2015).

Tabel 4.2

Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha dengan Harga Konstan menurut Provinsi di Indonesia per provinsi tahun 2012-2014 (Milliar Rupiah)

Nama Povinsi	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Aceh	101545,2	104874,2	108914,9	111992,3	113836
Sumatra Utara	331085,2	353147,6	375924,1	398779,3	419649,3
Sumatra Barat	105017,7	111679,5	118724,4	125874,7	133240,3
Riau	388578,2	410215,8	425626	436206	447616,2
Kepulauan Riau	111223,7	118961,4	128035	137134,9	147167,6
Jambi	90618,4	97740,9	104615,1	112008,7	120696,2
Sumatra Selatan	194013	206360,7	220459,2	232353,6	243228,6
Bangka Belitung	35561,9	38014	40104,9	42198,2	44171,6
Bengkulu	28352,6	30295,1	32363	34329,8	36215,8
Lampung	150560,8	160437,5	170769,2	180636,7	189809,5
DKI Jakarta	1075183,5	1147558,2	1222527,9	1297195,4	1374348,6
Jawa Barat	906685,8	965622,1	1028409,7	1093585,5	1148948,8
Banten	271465,3	290545,8	310385,6	332517,4	350699,7
Jawa Tengah	623224,6	656268,1	691343,1	726899,7	766271,8
DI Yogyakarta	64679	68049,9	71702,4	75637	79557,2
Jawa Timur	990648,8	1054401,8	1124464,6	1192841,9	1262700,2
Bali	93749,3	99991,6	106951,5	114109,3	121777,6
Nusa Tenggara Barat	70122,7	67379,1	66340,8	69755,6	73285,1
Nusa Tenggara Timur	43846,6	46334,1	48863,2	51512,3	54108,5
Kalimantan Barat	86065,9	90797,6	96161,9	101970,5	107092
Kalimantan Tengah	56531	60492,9	64649,2	69421	73734,9
Kalimantan Selatan	85305	91252,1	96697,8	101879,4	106820,7
Kalimantan Timur	418211,6	445264,4	469646,3	482442,1	492177,6
Sulawesi Utara	51721,3	54910,9	58677,6	62422,6	66358,8
Sulawesi Barat	17183,8	19027,5	20786,9	22229,2	24169,3
Sulawesi Tengah	51752,1	56833,8	62249,5	68191,9	71677,7
Sulawesi Tenggara	48401,2	53546,7	59785,4	64273,8	68298,7
Sulawesi Selatan	171740,7	185708,5	202184,6	217618,4	234084
Gorontalo	15475,7	16669,1	17987,1	19369,2	20781,3
Maluku	18428,6	19597,4	21000,1	22104,1	23585,1
Maluku Utara	14983,9	16002,5	17120,1	18211,3	19211,9
Papua	110808,2	106066,7	107890,9	116428,6	120217
Papua Barat	41361,7	42867,2	44423,3	47705,9	50272
Total Indonesia	6864133	7286914,7	7735785,3	8179836,3	8605809,6

Sumber : Badan Pusat Statistik.(2015)

1. Infrastruktur Jalan

Jalan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi transportasi darat. Fungsi jalan adalah sebagai penghubung satu wilayah dengan wilayah lainnya. Jalan merupakan infrastruktur yang paling berperan dalam perekonomian nasional. Besarnya mobilitas ekonomi tahun 2010 yang melalui jaringan jalan nasional dan propinsi rata-rata perhari dapat mencapai sekitar 201 juta kendaraan-kilometer (Bappenas.2013). Hal ini belum termasuk mobilitas ekonomi yang mempergunakan jaringan jalan kabupaten sepanjang 240 ribu kilometer serta jaringan jalan desa. Artinya adalah infrastruktur jalan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional.

Peran infrastruktur dalam mendukung pembangunan ekonomi amat penting, keadaan jalan sebagai penunjang kegiatan perekonomian mempunyai pengaruh yang begitu besar dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari Tabel 4.3, dimana ketika suatu daerah yang hanya memiliki jalan dengan kapasitas rendah seperti Provinsi Papua sebesar 16419 km pada tahun 2011, dengan PDRB sebesar 106066,7 milliyar. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 29110 km pada tahun 2011, dengan PDRB sebesar 656268,1 milliyar. maka perekonomiannya juga sebanding dengan dengan keadaan jalannya.

Tabel 4.3
Panjang Jalan per Provinsi menurut kewenangan Pemerintah (km)
tahun 2010-2014.

Nama Povinsi	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Aceh	21090	22457	22656	23099	23099
Sumatra Utara	34540	36049	36697	36788	36788
Sumatra Barat	20763	22034	22654	22928	22928
Riau	23506	23714	24530	24600	24600
Kepulauan Riau	4400	4514	4780	4954	4954
Jambi	1172	12436	13071	13342	13342
Sumatra Selatan	16615	16362	16911	17140	17140
Bangka Belitung	4717	4916	4913	4864	4864
Bengkulu	7500	7766	8341	8516	8577
Lampung	18520	19541	19439	19684	19684
DKI Jakarta	6743	7094	7094	7094	7094
Jawa Barat	25494	25500	24549	24608	24607
Banten	6456	6456	6506	6845	6845
Jawa Tengah	29203	29110	29342	29703	29703
DI Yogyakarta	4753	4592	4592	4267	4267
Jawa Timur	44044	45589	42512	42555	42555
Bali	7400	7530	7602	7699	7699
Nusa Tenggara Barat	8060	8089	8067	8083	8083
Nusa Tenggara Timur	19464	19464	20264	20508	20508
Kalimantan Barat	15007	14738	14901	15345	15345
Kalimantan Tengah	13765	13765	15176	15253	15253
Kalimantan Selatan	10943	11344	11552	11687	11687
Kalimantan Timur	14229	14767	15154	15661	15661
Sulawesi Utara	7561	8019	8174	8607	8607
Sulawesi Barat	6819	6819	6915	7039	7039
Sulawesi Tengah	18784	18387	18387	18790	18790
Sulawesi Tenggara	11313	11690	11859	11922	11922
Sulawesi Selatan	32553	32553	32779	32691	32691
Gorontalo	4464	4599	4694	4814	4814
Maluku	7216	7218	7671	7794	7794
Maluku Utara	5348	5348	5750	6200	6200
Papua	16324	16149	8089	8147	8147
Papua Barat	7998	7998	16348	16773	16773
Total Indonesia	476764	496607	501967	508000	508060

Sumber : Badan Pusat Statistik.(2015)

Dilihat dari tabel 4.3, pertumbuhan jalan di Indonesia terus meningkat di setiap 33 provinsi dari tahun 2010-2014. Di tahun 2011 tingkat pertumbuhan jalan di Indonesia sebesar 496607 km, dan di tahun 2014 sebesar 508060 km. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia terus meningkat.

2. Infrastruktur Listrik

Infrastruktur merupakan aspek terpenting dalam proses produksi untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti proses industri, kebutuhan rumah tangga dan aktifitas manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu listrik salah satu infrastruktur yang mempengaruhi pendapatan ekonomi suatu daerah. Karena tingginya PDRB suatu provinsi didukung oleh listrik yang cukup agar seimbang dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan ekonomi yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi.

Peran infrastruktur dalam mendukung pembangunan ekonomi amat penting, kapasitas terpasang pembangkit listrik sebagai penunjang kegiatan perekonomian mempunyai pengaruh yang begitu besar dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari Tabel 4.4, dimana ketika suatu daerah yang hanya memiliki listrik dengan kapasitas rendah seperti Provinsi Sulawesi Barat sebesar 6,49 Mw pada tahun 2011, dengan PDRB sebesar 19027,5 milyar. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur sebesar 9246,1200 Mw pada tahun 2011, dengan PDRB sebesar 1054401,8 milyar. maka perekonomiannya juga sebanding dengan dengan keadaan jalannya.

Tabel 4.4

Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Menurut Provinsi (Mega Watt),

Tahun 2010–2014

Nama Povinsi	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Aceh	173,97	159,26	156,93	128,54	127,52
Sumatra Utara	2066,97	2181,67	2899,67	3033,32	3066,97
Sumatra Barat	33,47	33,45	32,93	32,91	32,89
Riau	109,92	111,23	157,67	158,98	160,29
Kepulauan Riau	394,19	398,97	371,43	381,21	380,99
Jambi	14,14	12,82	51,38	50,06	48,74
Sumatra Selatan	1849,78	2380,92	2540,13	2767,76	2849,78
Bangka Belitung	88,56	91,78	111,46	106,46	117,91
Bengkulu	22,98	23,24	24,04	24,04	24,57
Lampung	4,30	4,30	124,79	124,79	124,79
DKI Jakarta	455,11	455,11	1448,49	1451,80	1455,11
Jawa Barat	3841,45	2167,00	4208,05	4674,75	4841,45
Banten	10883,54	10422,08	11323,54	11703,54	11883,54
Jawa Tengah	4139,24	4992,38	5168,49	5153,86	5139,24
DI Yogyakarta	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Jawa Timur	11516,10	9246,12	11595,42	12405,76	12516,10
Bali	3,69	3,84	453,87	454,02	454,17
Nusa Tenggara Barat	121,48	146,00	172,70	196,14	221,75
Nusa Tenggara Timur	140,21	145,75	158,69	160,54	169,78
Kalimantan Barat	227,03	230,51	239,55	243,03	246,51
Kalimantan Tengah	92,06	89,05	79,01	76,00	72,99
Kalimantan Selatan	297,42	306,82	468,92	478,32	487,72
Kalimantan Timur	347,17	412,50	456,10	524,50	586,77
Sulawesi Utara	242,06	202,06	458,32	345,19	378,32
Sulawesi Barat	2,53	6,49	6,39	12,39	14,32
Sulawesi Tengah	165,31	175,73	189,18	198,09	210,03
Sulawesi Tenggara	87,30	91,30	125,24	129,24	133,24
Sulawesi Selatan	215,76	625,96	1295,81	1140,85	1215,76
Gorontalo	33,79	33,20	31,44	31,44	30,27
Maluku	126,15	134,65	135,06	147,61	152,07
Maluku Utara	57,04	62,04	44,60	49,60	54,60
Papua	83,41	91,64	96,25	106,30	112,72
Papua Barat	49,36	55,67	58,67	66,64	71,30
Total Indonesia	37885,75	35493,86	44684,54	46558,00	47382,53

Sumber : Badan Pusat Statistik.(2015)

Dilihat dari tabel 4.3, pertumbuhan listrik di Indonesia terus meningkat di setiap 33 provinsi dari tahun 2010-2014. Di tahun 2012 tingkat pertumbuhan jalan di Indonesia sebesar 44684,54 Mw, dan di tahun 2014 sebesar 47382,53 Mw. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan listrik di Indonesia terus meningkat.

1. Infrastruktur Air

Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk di dunia ini. Kebutuhan akan air oleh manusia menyangkut dua hal, yaitu air untuk kehidupan kita sebagai makhluk hayati dan air untuk kehidupan kita sebagai manusia yang berbudaya. Kebutuhan air untuk memenuhi kehidupan hayati secara langsung diperlukan dalam produksi bahan makanan kita, seperti untuk tanaman padi, sayur-sayuran, holtikultura, kehidupan ikan, ternak dan sebagainya. Selain itu, air diperlukan oleh industri baik untuk proses pendinginan mesin dan pengangkutan limbah. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya memerlukan air untuk keperluan mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya.

Oleh karena itu, permasalahan air dan kesehatan lingkungan (*sanitation*) harus menjadi perhatian, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Ketersediaan air minum yang semakin terbatas dan langka (*scarcity*) menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia belum mampu menikmati atau mengakses pada sumber air minum yang sehat dan bersih. Di samping itu,

kondisi di atas diperparah dengan belum terbangunnya budaya untuk hidup sehat dari masyarakat dan sistem penyehatan lingkungan yang baik, seperti limbah, persampahan, dan drainase. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi karena buruknya infrastruktur air bersih/menurunnya kualitas produksi air bersih akan mempengaruhi faktor produksi yang merupakan bagian terpenting dalam penyumbang pertumbuhan ekonomi.

Peran infrastruktur dalam mendukung pembangunan ekonomi amat penting, khususnya untuk produksi air bersih sebagai penunjang kegiatan perekonomian mempunyai pengaruh yang begitu besar dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari Tabel 4.5, dimana ketika suatu daerah yang hanya memiliki produksi air bersih dengan kapasitas rendah seperti Provinsi Papua Barat sebesar 3940 m³ pada tahun 2011, dengan PDRB sebesar 42867,2 milliyar. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur sebesar 377577 m³ pada tahun 2011, dengan PDRB sebesar 1054401,8 milliyar. maka perekonomiannya juga sebanding dengan dengan keadaan produksi air bersihnya.

Tabel 4.5

Data jumlah Air bersih yang disalurkan per Provinsi (m3) tahun 2010-2014

Nama Povinsi	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Aceh	49379	27222	18456	18752	19049
Sumatra Utara	199545	211151	233677	232517	249583
Sumatra Barat	46147	47851	54306	156128	160207
Riau	16378	12388	14484	15757	14810
Kepulauan Riau	51656	66000	66894	73920	76859
Jambi	22330	23855	26333	23213	25214
Sumatra Selatan	23510	88604	144920	113494	140562
Bangka Belitung	3360	3679	4775	4050	4757
Bengulu	13299	12950	14531	14473	15090
Lampung	13467	14828	16287	14798	16208
DKI Jakarta	417980	596222	627718	625445	645684
Jawa Barat	251548	273701	303721	247968	274055
Banten	179853	152087	151949	206305	192353
Jawa Tengah	238455	248190	266993	283336	297605
DI Yogyakarta	22724	22416	23699	20870	21358
Jawa Timur	368921	377577	398568	435745	450568
Bali	102214	104204	113419	145400	151003
Nusa Tenggara Barat	41990	44270	46160	48020	50105
Nusa Tenggara Timur	22050	22914	25353	27354	29006
Kalimantan Barat	34293	37000	39524	40786	43402
Kalimantan Tengah	21024	23282	24751	26236	28100
Kalimantan Selatan	58781	64191	68231	82114	86839
Kalimantan Timur	89713	102392	107480	106778	109936
Sulawesi Utara	11043	17498	18633	19190	22985
Sulawesi Barat	3986	4578	5356	5250	5934
Sulawesi Tengah	17508	17133	18646	20698	21267
Sulawesi Tenggara	7574	10808	11075	10988	11137
Sulawesi Selatan	72345	72553	76518	86792	88879
Gorontalo	7722	9600	11297	10129	11917
Maluku	5612	7319	7114	7209	7104
Maluku Utara	8363	9551	10303	4784	5755
Papua	12151	12467	13927	14025	14913
Papua Barat	3704	3940	3550	3923	3846
Total Indonesia	2438625	2742421	2968648	3146447	3296090

Sumber : Badan Pusat Statistik.(2015)

Dilihat dari tabel 4.5, Produksi air bersih di indonesia terus meningkat di setiap 33 provinsi dari tahun 2010-2014. Ditahun 210 tingkat pertumbuhan jalan di indonesia sebesar 2438625, dan di tahun 2014 sebesar 3296090 m3. Hal ini menunjukkan bahwa produksi air bersih di Indonesia terus meningkat.